

ABSTRAK

Pemberian pelayanan perizinan yang cepat kepada pelaku usaha atau masyarakat (*Public Services*) dan kesejahteraan umum merupakan kewajiban utama bagi negara. Kewajiban pemerintah salah satunya ikut berperan dalam proses pemberian pelayanan. Pemberian pelayanan pemerintah kepada masyarakat yaitu bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya. Pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sangat ditentukan sistem pelayanan. Pemerintah meluncurkan sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai solusi permasalahan dibidang pelayanan perizinan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode *yuridis empiris* dengan spesifikasi penelitian menggunakan *deskriptif analitis* dan pengambilan data menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan menjadi legalitas utama bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dan perizinan memiliki sifat *controlling* bagi pemerintah. Perizinan merupakan upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum. Mekanisme perizinan harus melalui penerapan prosedur ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu pemanfaatan lahan. Ketatnya penerapan prosedur perizinan tidak berarti harus berbelit-belit, akan tetapi sesuai dengan fungsinya yaitu untuk pengaturan. Pelayanan perizinan yang diberikan pemerintah melalui sistem baru yaitu *Online Single Submission* (OSS) menjadi solusi atas kendala yang umum dihadapi bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusahnya. Pendaftaran perizinan berusaha yang dilakukan oleh pelaku usaha menghasilkan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB berfungsi untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersional/operasional. Pada penerbitan izin usaha dan izin komersial/operasional pelaku usaha wajib melakukan pemenuhan komitmennya agar izinnya berlaku efektif. Hambatan yang terjadi pada pelaksanaan sistem *Online Single Submission* (OSS) seperti sulitnya akses masuk *website* pada saat pasca *launching*, kurang pahamnya pelaku usaha terhadap informasi baru mampu dicarikan solusi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah. Upaya-upaya yang dilakukan DPMPTSP Jawa Tengah berupa pendampingan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan izin dimulai dari pendaftaran hingga berlakunya izin.

Kata Kunci : Pelayanan, Perizinan, *Online Single Submission* (OSS), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

ABSTRACT

The provision of fast licensing services to business people or the public (Public Services) and general welfare is the main obligation for the country. The obligation of the government one of them plays a role in the service delivery process. Providing government services to the community is acting as a catalyst that speeds up the process according to what it should be. Services provided by the government to the community are very much determined by the service system. The government launched the Online Single Submission (OSS) system as a solution to problems in licensing services.

The approach method used in writing this law is an empirical juridical method with the specification of the study using descriptive analytics and data retrieval using interview methods and literature studies.

The results of the study show that licensing is the main legality for businesses to run their businesses and licensing has a controlling nature for the government. Licensing is an effort to regulate activities that have the opportunity to cause disruption to the public interest. The licensing mechanism must go through the application of strict procedures and provisions that must be met to carry out a land use. The strict application of licensing procedures does not mean that it must be convoluted, but according to its function, namely for regulation. Licensing services provided by the government through a new system, Online Single Submission (OSS), are a solution to the common obstacles faced by businesses in managing business permits. Registration of business licenses carried out by business actors produces a Business Registration Number (NIB). The function is to obtain business licenses and commercial / operational permits. In the issuance of business licenses and commercial / operational licenses, business actors must fulfill their commitments so that their licenses are effective. Constraints that occur in the implementation of the Online Single Submission (OSS) system such as the difficulty of access to the website at the time of launch, the lack of understanding of business actors on new information can be found a solution by the Central Java One Stop Investment Services (DPMPTSP). The efforts made by the Central Java DPMPTSP in the form of assistance to business actors to obtain permits began from registration to the entry into force of the permit.

Keywords: *Services, Licensing, Online Single Submission (OSS, Investment Services and One-Stop Integrated Services (DPMPTSP)*